

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kepailitan yang dialami oleh suatu perseroan terbatas, yang mana tidak hanya berdampak pada para pemegang saham dan kreditur, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap hak-hak karyawan yang terdampak langsung oleh proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada karyawan pasca kepailitan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi dokumen dan bahan hukum sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak karyawan setelah perusahaan dinyatakan pailit mencakup berbagai aspek, antara lain pengakuan sebagai kreditur preferen dalam hal pembayaran gaji dan hak normatif lainnya, pemenuhan hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, akses terhadap jaminan sosial, hingga pemberian bantuan hukum dan pendampingan dalam proses peradilan niaga. Dalam pelaksanaannya, kerap kali menghadapi hambatan yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: (1) hambatan personal berupa rendahnya pemahaman hukum di kalangan pekerja; (2) hambatan kelembagaan yang meliputi ketidaktertiban administratif dan kurangnya peran aktif dari institusi pendukung seperti kurator dan serikat pekerja; serta (3) hambatan normatif akibat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak-hak karyawan dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perbaikan regulasi, peningkatan literasi hukum pekerja, serta penguatan peran kelembagaan untuk menjamin perlindungan yang efektif dan adil bagi karyawan pasca kepailitan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karyawan, Kepailitan, Perseroan Terbatas, Hak Normatif

ABSTRACT

This study examines the issue of bankruptcy experienced by a limited liability company, which not only impacts shareholders and creditors but also imposes significant consequences on the rights of employees directly affected by the process. The research aims to analyze the forms of legal protection afforded to employees following a company's bankruptcy, as well as to identify the obstacles that arise in its implementation. The methodology applied in this study is a normative juridical approach, focusing on the analysis of applicable laws and regulations, supported by an empirical juridical method through document analysis and secondary legal materials. The findings reveal that employee protection post-bankruptcy encompasses several dimensions, including recognition as preferred creditors in the context of wage payments and other normative entitlements, fulfillment of severance pay, long-service awards, and compensation rights, access to social security programs, and the provision of legal assistance and advocacy throughout the commercial court process. In practice, the implementation of these protections often encounters challenges that can be classified into three categories: (1) personal constraints, such as limited legal understanding among workers; (2) institutional obstacles, including administrative disorder and the insufficient engagement of support institutions such as curators and labor unions; and (3) normative barriers arising from divergent interpretations of the laws regulating employee rights during bankruptcy proceedings. Therefore, there is an urgent need for a synergistic approach involving regulatory reform, enhancement of legal literacy among workers, and strengthening of institutional roles to ensure effective and equitable protection of employees' rights in the aftermath of corporate bankruptcy.

Keywords: Legal Protection, Employees, Bankruptcy, Limited Liability Company, Normative Rights